

SKRIPSI

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PUTUSAN MK NO. 30/PUU-XVI/2018 DAN PUTUSAN MA NO. 65
P/HUM/2018 TERKAIT *JUDICIAL REVIEW* ATAS SYARAT
PENCALONAN ANGGOTA DPD**



Diajukan oleh :

Doby Agustinus Situmorang

N P M : 150512182
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2019

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MK
NO. 30/PUU-XVI/2018 DAN PUTUSAN MA NO. 65 P/HUM/2018 TERKAIT
JUDICIAL REVIEW ATAS SYARAT PENCALONAN ANGGOTA DPD**



**Diajukan oleh :
Doby Agustinus Situmorang**

**N P M : 150512182
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 29 APRIL 2019

Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.

Tanda Tangan



**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MK
NO. 30/PUU-XVI/2018 DAN PUTUSAN MA NO. 65 P/HUM/2018 TERKAIT
JUDICIAL REVIEW ATAS SYARAT PENCALONAN ANGGOTA DPD**



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 Mei 2019
Tempat : Ruang Sidang Skripsi

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Y. Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.
Anggota : Y. Hartono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini, saya dedikasikan kepada Bapak **Oloan Situmorang, S.H.** dan Ibu **Orlide Nainggolan** serta seluruh kerabat yang atas segala kekuatan yang selalu mereka salurkan dalam setiap doa-doanya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

HALAMAN MOTTO

**“KAMU DILAHIRKAN BUKAN UNTUK MENGELUH
MELAINKAN UNTUK BERBUAT SESUATU”**

“Setiap dari kita semua pasti diberikan Tuhan sebuah kemampuan. Keterbatasan yang kamu miliki bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan sesuatu.”

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari pengetahuan penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 April 2019

Yang menyatakan,

Doby Agustinus Situmorang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sejak awal hingga akhir penyelesaian penulisan hukum/skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikannya. Penelitian dengan judul "*Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan MK NO. 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA NO. 65 P/HUM/2018 Terkait Judicial Review Atas Syarat Pencalonan Anggota DPD*" merupakan problematika hukum yang sangat pelik penyelesaiannya. Oleh karenanya, penulis merasa mempunyai tanggungjawab baik secara moral maupun keilmuan untuk mencari dan menemukan solusi atas persoalan tersebut. Diharapkan dalam penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan pengaruh dalam khazanah ilmu hukum, terkhusus pada bidang hukum tata negara di Indonesia. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hukum/skripsi ini.
2. Ibu Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis yang telah banyak memberikan pengetahuan terkait dengan penulisan ilmiah terkhusus dalam bidang Ilmu Hukum.

3. Bapak Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M. Hum., selaku dosen dan pakar di bidang hukum tata negara yang bersedia menjadi narasumber untuk menunjang data penelitian penulis.
4. Ibu Siti Ghoniyatun, S.H., selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersedia menjadi narasumber untuk menunjang data penelitian penulis.
5. Segenap Bapak/Ibu tenaga pendidik/dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memotivasi penulis akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk masa depan penulis.
6. Semua teman diskusi khususnya Oswaldo Sitanggang, Elvidius Evatrianta dan Pangeran Purba yang sedikit banyak membantu penulis tidak hanya dalam penulisan skripsi ini melainkan dalam segala hal yang berkaitan dengan pengembangan akademis maupun non akademis penulis.
7. Sintia Evitaveren Sidauruk yang menjadi teman setia dalam mendengar setiap keluh kesah penulis dan selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Permohonan maaf sebesar-besarnya jika ada kata ataupun kalimat yang tidak berkenaan di dalam penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 29 April 2019

Penulis,

Doby Agustinus Situmorang

ABSTRACT

Judicial Review is the constitutional mechanism held by the Indonesian Constitutional Court and the Supreme Court. The existence of different legal approach and legal consideration in examine the same substance of the law and regulation submitted to the court by Judicial Review mechanism is certainly a problem. This paper entitled "Disparity in Legal Considerations of Judges in the Decision of the Constitutional Court No. 30 / PUU-XVI / 2018 and Supreme Court Decision No. 65 P / HUM / 2018 Related to Judicial Review of Terms of Regional Representative Council Members " This paper analyses, first, how does the judge deliberate the legal consideration in the Judgement of the Constitutional Court No. 30 / PUU-XVI / 2018 and Supreme Court Judgement No. 65 P / HUM / 2018 concerning on the terms of the members of the Regional Representative Council. Second, how are the requirements for nominating the members of the Regional Representative Council if there is a disparity between the decision of the judge between the decisions of the Constitutional Court and the Supreme Court. This paper uses normative legal research approach. The author concluded that first, the legal consideration of the judge in the Judgment of the Constitutional Court No. 30 / PUU-XVI / 2018 and Supreme Court Judgement No. 65 P / HUM / 2018 is contradictory, because the Constitutional Court prohibits the management of political parties as candidates for members of the Regional Representative Council for the 2019 Election and subsequent Elections, while in its judgement, the Supreme Court prohibits the management of political parties as candidates for Regional Representative Council members only for the General Election after the 2019 Election. Second, the General Election Commission implements both of these decisions, General Election Commission requires that to be a candidate for a Regional Representative Council, the member must be a person who is not currently serving as the manager of a political party.

Keyword : disparity, judicial review, decision of the constitutional court, supreme court dicision, general election, regional representative council

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penulisan	6
F. Batasan Konsep.....	12
G. Motode Penelitian	14
BAB II PEMBAHASAN	18
A. Landasan Teori	18
1. Pengertian Disparitas	18
2. Pengertian Petimbangan Hakim	18
3. Pengertian <i>Judicial Review</i>	20

4.	Kewenangan <i>Judicial Review</i> Oleh Mahkamah Konstitusi	21
5.	Kewenangan <i>Judicial Review</i> Oleh Mahkamah Agung	24
B.	Tinjauan Yuridis.....	26
1.	Tinjauan Yuridis atas Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018	26
2.	Tinjauan Yuridis atas Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018.....	34
3.	Tinjauan Terhadap Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim	43
C.	Pelaksanaan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018 Atas Syarat Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah ..	51
1.	Kekuatan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi	51
2.	Kekuatan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung	53
3.	Pelaksanaan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018 Atas Syarat Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum.....	56
BAB III PENUTUP		66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....		69